

Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Ngampungan Berbasis Go-Digital Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Nurhayati*,
Susy Andriani
STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi*: noerhays@gmail.com

Abstract

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diprakarsai oleh pemerintah pusat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Jombang, dengan pemberian dana stimulus sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk setiap desa, termasuk desa Ngampungan yang terletak di kecamatan Bareng, Jombang dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera dengan jenis usaha unit simpan pinjam, dan unit pariwisata. Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera sudah cukup baik namun masih dalam bentuk manual. Untuk itu, penulis bersama team mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di desa Ngampungan melakukan kegiatan pembenahan pembukuan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera dengan fokus kegiatan perbaikan performa tempat wisata dengan cara membuat spot foto, gazebo dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh penulis bersama team mahasiswa.

Kata kunci : BUMDes Ngampungan, Maju Sejahtera, Go- Digital

Abstract

The establishment of Village Owned Enterprises (BUMDes) initiated by the central government was immediately followed up by the Jombang local government, by providing stimulus funds of Rp. 100,000,000.00 for each village, including Ngampungan village located in Bareng sub-district, Jombang by forming a Village-Owned Enterprise (BUMDes) Maju Sejahtera with the types of businesses being savings and loan units, and tourism units. In its development, financial management at the Maju Sejahtera Village-Owned Enterprises (BUMDes) has been quite good but is still in manual form. For this reason, the author and the student team carried out community service activities (PKM) in the village of Ngampungan carrying out bookkeeping activities at the Maju Sejahtera Village-Owned Enterprises (BUMDes) with a focus on improving the performance of tourist attractions by making photo spots, gazebos and so on. The activity has been well completed by the author and the student team.

Keywords: BUMDes Ngampungan, Forward Prosperity, Go-Digital

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia, sekaligus dengan adanya kondisi pandemic covid-19 yang telah melanda Indonesia dan dunia sehingga seluruh aspek kehidupan dibatasi termasuk aspek ekonomi, untuk bisa tetap berjalan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah menganjurkan untuk meningkatkan pemasaran digital marketing dengan Basis Digital. Untuk mendukung program Pemerintah, melalui program Kuliah Kerja Nyata mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang digerakkan untuk membantu dan mengabdikan kepada Desa. Dalam program PKM ini tim penulis berfokus pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan perbaikan performa tempat wisata.

Kegiatan ini dilakukan di BUMDes Maju Sejahtera yang terletak di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. BUMDes Maju Sejahtera bergerak di bidang pariwisata, simpan pinjam, dan penyewaan molen. Target pasar selama ini hanyalah penduduk sekitar desa Ngampungan. Kegiatan PKM ini

dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 26 Juli sampai 26 Agustus 2021. Hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya program baru untuk pengembangan BUMDes, terciptanya media yang bisa digunakan untuk pemasaran via online serta terbantunya masyarakat sekitar dengan program kerja yang direncanakan.

BUMDes Maju Sejahtera merupakan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang terletak di desa Ngampung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. BUMDes Maju Sejahtera berdiri sejak tahun 2016. Dana Operasional dari pemerintah digunakan BUMDes untuk mengelola Unit yang terdapat di BUMDes yaitu Unit Pariwisata Pandansili, Unit Simpan Pinjam, dan Pensewaan Molen.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warrga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat (Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S; 2017).

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Desa (PerDes). Asset ekonomi yang ada di Desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/ 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa"

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Unit BUMDes Maju Sejahtera memiliki usaha simpan pinjam, persewaan molen, dan wisata pandansili. Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Unit Peminjaman (Persewaan Modal)
 - a. Kurangnya pemahaman mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Unit Persewaan Mesin Molen

- a. Kurangnya pemahaman mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
 - b. Kesulitan dalam hal pengangkatan mesin molen ke atas kendaraan.
 - c. Sepinya bisnis persewaan molen karena mayoritas masyarakat menggunakan tenaga manusia dan mesin molen hanya digunakan ketika ada pembangunan proyek berskala besar.
3. Unir Pariwisata (Wisata Pandansili)
- a. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital marketing.
 - b. Kurangnya fasilitas yang terdapat pada area tempat wisata seperti spot foto, gazebo dan lain sebagainya.

Melihat permasalahan tersebut, kegiatan PKM ini berfokus dalam pengembangan unit usaha, dan akan dijalankan selama sebulan terhitung dari 26 Juli – 26 Agustus 2021. Untuk pelaksanaan pada semester ini, penulis dan tim menitikberatkan pelaksanaan kegiatan pada digitalisasi media yang nantinya akan digunakan sebagai media pemasaran yang dapat dijangkau lebih luas, tidak hanya ada disekitar desa tersebut.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan PKM ini dilakukan selama satu bulan dengan fokus pada pengelolaan tempat wisata berupa sendang (danau kecil) Ngampungan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera. Lokasi wisata berada di desa Ngampungan kecamatan Bareng kabupaten Jombang. Tanggal pelaksanaan kegiatan adalah pada tanggal 26 Juli – 26 Agustus 2021.



Gambar 1: Koordinasi antara tim pelaksana PKM dan pengurus BUMDes

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, tim penulis dengan dibantu mahasiswa melakukan beberapa penambahan fasilitas pada tempat wisata tersebut antara lain penambahan spot foto, pembangunan gazebo, penambahan taman dan kebersihan lingkungan. Kegiatan dapat dijalankan dengan baik, dengan respon positif dari warga dan masyarakat sekitar.



Gambar 2: Pembuatan Spot Foto Di Lokasi Wisata

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan dan pengenalan lebih dalam dengan BUMDes yang mana akan memudahkan kelompok dalam penyusunan kegiatan, sekaligus dilakukan diskusi yang membahas mengenai rencana program kerja yang akan dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan direktur BUMDes Maju Sejahtera.



Gambar 3: Koordinasi antara tim pelaksana PKM dengan Direktur BUMDes

E. PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim penulis dengan dibantu mahasiswa telah berjalan dengan baik. Kawasan wisata di desa Ngampungan yang dikelola oleh BUMDes Maju Sejahtera menjadi lebih baik tampilannya karena adanya beberapa tambahan spot foto bagi para pengunjung. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan local karena adanya promosi melalui berbagai sosial media yang dibuat oleh tim penulis bersama mahasiswa. Diharapkan, kegiatan ini bisa menjadi stimulus bagi perbaikan performa lokasi wisata Ngampungan dan BUMDes Maju Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Herawati, E. (2016, Oktober). Binus business-law. Retrieved April 2018, from Binus Business Law Web site: <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/>
- Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. *Comvice: Journal Of Community Service*, 1(1), 33-38.
- Mutiarni, R. (2017). Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 12(2 Okt), 135-148.
- Undang-Undang, R. I. No. 32 tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah. Indonesia, R. (1999).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, (8)